

EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021
Per 18 Oktober 2021

**I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH
(PEMBICARAAN TINGKAT I)
[14 RUU TERDIRI DARI 8 RUU USUL DPR, 4 RUU USUL PEMERINTAH, 2
RUU USUL DPD]**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 3 Februari 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi I; • Surpres Tgl 24 Januari 2020 No. R-05/Pres/01/2020
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/ ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Desember 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi II • Surpres tgl 12 Juni 2020 No.R-28/Pres/06/2020 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 • Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 • Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi
3	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/ KOMISI V	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi V • Surpres Tgl 17 Februari 2021 No. R-07/Pres/02/2021 dibahas oleh Komisi V • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 8 Desember 2020 • Surat Pengusul RUU (Komisi V) No: LG/11939/DPR RI/X/2020 Tgl 2 Oktober 2020
4	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU Sedang Proses Pembicaraan TK.I di Komisi V • Surpres Tgl 16 Juni 2021 No. R-28/Pres/06/2021 • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 13 Juli 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Komisi V • Surpres tgl 16 Juni 2021 NoR-28/Pres/06/2021 (Menteri Desa PDDT, Mendagri, Menkeu, dan Mekumham)
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	DPR/ KOMISI VIII	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi VIII • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 27 Agustus 2020 dibahas oleh Komisi

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	tentang Penanggulangan Bencana		VIII <ul style="list-style-type: none"> • Surpres Tgl 20 Juli 2020 No. R-33/Pres/07/2020 (Menteri Sosial, Mendagri, Menkeu, Menpan RB, Menkes, dan Menkumham) • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 • Selesai Harmonisasi Tgl 8 Mei 2020
6	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR/ ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi X • Surpres tgl 10 Desember 2020 nomor R-48/Pres/12/2020 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 • Selesai Harmonisasi Tgl 29 Juni 2020 • Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk diharmonisasi
7	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/ KOMISI X	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi X • Surpres Tgl 18 Juni 2021 R-29/PRES/06/2021 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 • Selesai Harmonisasi Tgl 8 April 2021 • Surat Pengusul (Komisi X) Nomor: LG /14573/DPR RI/XII/2020 tgl 3 Desember 2020 permintaan utk di harmonisasi
8	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.	DPR/ BADAN LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi • Rapat konsultasi pengganti rapat Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 September 2021 MP I 2020-2021 dibahas oleh Badan Legislasi • Surpres tgl 14 September 2021 nomor R-41/Pres/09/2021 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 • Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
9	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.	DPR/ BADAN LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi • Rapat konsultasi pengganti rapat Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 September 2021 MP I 2020-2021 dibahas oleh Badan Legislasi • Surpres tgl 14 September 2021 nomor R-42/Pres/09/2021 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 15 Juli 2021 • Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau,	DPR/ BADAN LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan TK I di Badan Legislasi • Rapat konsultasi pengganti rapat Rapat

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.		<p>Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 30 September 2021 MP I 2020-2021 dibahas oleh Badan Legislasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surpres tgl 14 September 2021 nomor R-40/Pres/09/2021 • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 15 Juli 2021 • Selesai Penyusunan Tgl 14 Juni 2021
11	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi XI • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 17 Juni 2021 dibahas oleh Komisi XI • Surpres tgl 5 Mei 2021 nomor R-22/Pres/5/2021
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus • Surpres tgl 8 Oktober 2020 nomor R-42/PRES/10/2020
13	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Agustus 2021 dibahas oleh Komisi III • Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021
14	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	<ul style="list-style-type: none"> • RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus • Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus • Surpres Tgl 20 Mei 2020 Nomor : R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham)

**II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I
[11 RUU TERDIRI DARI 1 RUU USUL BALEG, 1 RUU USUL KOMISI, 2
RUU USUL PEMERINTAH DAN 7 RUU KUMULATIF TERBUKA]**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/ KOMISI III	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Surpres • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 9 April 2021 • Selesai penyempurnaan Harmonisasi Tgl 25 Maret 2021 • Surat Pengusul (Komisi III) Nomor: 332-DW/KOM.III/MP.I/VIII/2020 tgl 25 Agustus 2020 permintaan utk di harmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR/ BADAN LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 September 2021 • Selesai Penyusunan Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan di Komisi II • Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 • RUU Menunggu Surpres • RUU Kumulatif Terbuka

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	DPR / Komisi II	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan di Komisi II Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 RUU Menunggu Surpres RUU Kumulatif Terbuka
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus law</i>)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI [2 RUU]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	DPR/ KOMISI XI/ PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> RUU dalam tahap harmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/ KOMISI VII	<ul style="list-style-type: none"> Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tgl 5 Juli 2021)

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI [10 RUU TERDIRI DARI 4 RUU USUL BALEG, 4 RUU USUL KOMISI, 2 RUU USUL ANGGOTA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/ BADAN LEGISLASI	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 1 Juli 2020
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk diharmonisasi

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	Proses penyusunan di Komisi I
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/ KOMISI IV	Proses penyusunan di Komisi IV
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/ KOMISI VI	Proses penyusunan di Komisi VI
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR/ KOMISI IX	Proses penyusunan di Komisi IX
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (5 RUU)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM)
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)		(Pemrakarsa Kementerian Kesehatan)
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Komunikasi dan Informatika)
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM) RUU <i>Carry Over</i> dari Periode 2014-2019
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM) RUU <i>Carry Over</i> dari Periode 2014-2019

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.			

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

[7 RUU TERDIRI DARI 2 (DUA) RUU USUL PEMERINTAH DAN 5 (LIMA) RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 7 September 2021 RUU KUMULATIF TERBUKA
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 7 September 2021 RUU KUMULATIF TERBUKA

	ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)		
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Juli 2021 RUU sudah selesai dalam Pembicaraan Tk. I di Pansus tgl 12 Juli 2021 Surpres tgl 4 Desember 2020 nomor R-47/Pres/12/2020
4.	RUU tentang Pengesahan <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States</i> (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA)	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 9 April 2021 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 24 September 2020 MP I 2020-2021 dibahas oleh Komisi VI Surpres No: R-36/Pres/08/2020 Tgl 19 Agustus 2020 RUU KUMULATIF TERBUKA
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Crime</i>).	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 9 September 2021 RUU KUMULATIF TERBUKA
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 30 September 2021 RUU KUMULATIF TERBUKA
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Judul dalam Prolegnas : RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	PEMERINTAH	<ul style="list-style-type: none"> Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 7 Oktober 2021 RUU sudah selesai dalam Pembicaraan Tk. I di Komisi XI tgl 29 September 2021 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 17 Juni 2021 dibahas oleh Komisi XI Surpres tgl 5 Mei 2021 nomor R-21/Pres/5/2021

